

PENGARUH VARIABEL PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA 2007-2014; MODEL VECTOR AUTOREGRESSION (VAR)

Fadly Yashari Soumena

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

No. Telp: 0274 387649 (hotline), 0274 387656 ext. 199/200 No. Fax: 0274 387649

Email : fadly.yashari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Variabel Pilihan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap Perekonomian Indonesia tahun 2007-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Pembiayaan (PB), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Vector Autoregression (VAR) dan dua pendekatan kualitatif yaitu Analisis Stakeholder Cooperation with Participatory Approach dan Pilot Project.

Berdasarkan hasil analisis yang digunakan dalam penelitian diperoleh semua variabel memiliki pengaruh terhadap PDB. DPK menjadi leading indicator (indikator yang dapat mempengaruhi pergerakan) bagi PDB. DPK menjadi leading indicator (indikator yang dapat mempengaruhi pergerakan) bagi Pembiayaan (PB), NPF, dan SBIS. Model regresi VAR menunjukkan variabel Pembiayaan berpengaruh positif terhadap PDB, sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif terhadap PDB. Analisis IRF menunjukkan variabel Pembiayaan, DPK, SBIS berpengaruh positif terhadap PDB, sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif.

Kata Kunci : PDB, Pembiayaan, DPK, NPF, SBIS, VAR, IRF

ABSTARCT

This research aimed to analyze the effect of variable option on Islamic Commercial Banks and Islamic Business Unit on Indonesia's Economy in 2007-2014. Variables used in the research of the Gross Domestic Product (GDP), Financing (PB), Depositor Fund (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bank Indonesia Islamic Certificate (SBIS). The analysis used in this study is Autoregression Vector Model (VAR) and two qualitative approach that Analysis Stakeholder Cooperation with Participatory Approach and the Pilot Project. Based on the analysis used in the study was obtained all the variables had an influence on GDP. DPK become leading indicators (indicators that can affect the movement) to GDP. DPK become leading indicators (indicators that can affect the movement) for Financing (PB), NPF, and

SBIS. VAR regression model showed variable Financing positive effect on GDP, while variable NPF negative effect on GDP. IRF analysis showed variable financing, deposits, SBIS positive effect on GDP, while the variable NPF negative effect.

Keywords: *GDP, financing, deposits, NPF, SBIS, VAR, IRF*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu proses yang terakumulasi selama kurun waktu yang cukup panjang. Wacana lembaga keuangan syariah merebak di tengah masyarakat mengikuti perbincangan mengenai pro dan kontra mengenai hukum bunga bank. Semangat terwujudnya bank islam di Indonesia dari waktu ke waktu semakin besar seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran beragama di kalangan Islam itu sendiri (Imamudin Yuliadi,2007:113). Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah diartikan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Salah satu bagian perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) yang juga memberikan pelayanan kepada nasabah khususnya dibidang pembiayaan/kredit.

Pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa : (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna' (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh dan (d) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Ketersediaan pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya BUS dan UUS juga dipengaruhi akses perbankan yang mudah. Jumlah BUS dan UUS di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu antara tahun 2009-2014.

Tabel 1.1

Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2014 (BUS/UUS)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
BANK UMUM SYARIAH						
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12
Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151
UNIT USAHA SYARIAH						
Jumlah Bank	25	23	24	24	23	22
Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320
TOTAL	1.089	1.511	1.772	2.297	2.622	2.505

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015,*Angka Sementara/Desember 2014

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa BUS mengalami peningkatan jumlah sarana dan prasarana baik dalam bentuk bank dan kantor. Peningkatan jumlah bank terlihat signifikan dari tahun 2009 (6 bank) sampai tahun 2010 (11 bank) atau bertambah 5 bank dan bertahan hingga tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 telah mencapai 12 bank di seluruh Indonesia. Di sisi jumlah kantor, BUS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah menyentuh angka 2.151 kantor pada 2014. Fluktuasi jumlah BUS dan UUS di Indonesia inilah yang menunjukkan kekhawatiran akan berdampak pada daya tarik dan peluang masyarakat menggunakan layanan produk perbankan syariah khususnya pada sektor pembiayaan. Salah satu pos pembiayaan yang terdapat dalam BUS dan UUS adalah pembiayaan berdasar golongan. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan selain UKM.

Tabel.1.2
Pembiayaan - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan 2009-Januari 2015

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
UKM	35.799	52.570	71.810	90.860	110.086	59.806	58.142
Selain UKM	11.087	15.611	30.845	56.645	74.034	139.524	139.138
TOTAL	46.886	68.181	102.655	147.505	184.120	199.330	197.279

*Angka desember 2014, **Angka januari 2015

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

Dalam bukunya yang berjudul *Towards a Just Monetary System*, M. Umer Capra mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. (Remy Sjahdeini,1999:21-22)

Non Performing Financing (NPF) menjadi salah satu permasalahan perbankan syariah di Indonesia karena nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. (Fajar Adi N, 2014). Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah NPF yang ada pada pembiayaan berdasar golongan di BUS dan UUS dari tahun 2009-2013.

Tabel .1.3
Tingkat NPF Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah)
Berdasarkan Golongan Pembiayaan di Indonesia

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah NPF
2009	46.886	1.882
2010	68.181	2.061
2011	102.655	2.588
2012	147.505	3.269
2013	184.120	4.828

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan berdasar golongan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) pembiayaan berdasar golongan pembiayaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (UU No 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah).

Menurut *handbook of Islamic Banking*, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan

(*financial instrument*) yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Bank islam berbeda dengan bank tradisional (Konvensional) dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara islam. Perbankan islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasar bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim. (Sjahdeini,1999:21)

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No.21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 8). Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (UU No 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 10) .

Pembiayaan Syariah

Menurut undang-undang No. 10/1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terdiri atas Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, *As-Salam*, *Istishna*, dan *Ijarah*. Berdasarkan pengertian Statistik Perbankan Syariah, pembiayaan berdasar golongan oleh perbankan syariah (BUS/UUS) ditinjau dari dua aspek yaitu 1) Jumlah pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 2) Jumlah pembiayaan selain UKM/Non-UMKM.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznest (1985) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Boediono (1998) mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Mencakup tiga aspek yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Mankiw (2008) mengartikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. Komponen PDB adalah PDB (yang dilambangkan dengan Y) dibagi menjadi empat komponen yaitu : Konsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G), dan Ekspor Netto

(NX). Teori pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Teori pertumbuhan ekonomi Scumpeter, Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, Teori Mazhab Kedua (Mainstream), dan Teori Mazhab Ketiga (Alternatif).

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy,2008). Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan DPK sebagai kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit/pembiayaan. Komponen DPK terdiri atas tiga bagian antara lain giro, deposito, dan tabungan

Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Definisi lain menjelaskan bahwa NPF adalah pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap total pembiayaan yang disalurkan. (Djohanputro dan kountor:2007:3).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), mendefinisikannya sebagai surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan SBIS adalah sebagai salah satu instrumen pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini adalah hubungan atau pengaruh variabel pilihan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pembiayaan, Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan jenis data sekunder dalam bentuk data triwulan/kuartal selama delapan tahun, yaitu data pembiayaan berdasar golongan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), NPF, DPK, SBIS dan PDB yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu Maret 2007 sampai dengan Desember 2014.

Data Sekunder

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Bank Indonesia (www.bi.go.id), Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta arsip/publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan tersebut dikumpulkan dengan melakukan non participant observation, yaitu melakukan pengunduhan (Download) dari berbagai situs yang relevan dengan kesesuaian kebutuhan data, mencatat dan atau menyalin data dari berbagai data publikasi laporan keuangan dan berbagai studi pustaka ilmiah yang terkait.

Model Penelitian

Berdasarkan variabel di atas maka dapat dibuat model VAR standar menurut Enders yaitu :

$$Y_t = \beta_{11}Y_{t-1} + \beta_{12}Z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \dots \dots \dots (1)$$

$$Z_t = \beta_{21}Y_{t-1} + \beta_{22}Z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana (Y,Z,) masing-masing adalah variabel transmit dan *while noise* yang dapat berkorelasi satu sama lain. Jika variabel-variabel tersebut dimasukkan dalam model, maka model penelitiannya sebagai berikut :

$$Z_t = \sum_k^n = 1 K Var PDB - k + \sum_k^n = 1 1PBY_t - K \sum_k^n = 1 DPK_t - k \sum_k^n = 1 NPF - k \sum_k^n = 1 SBIS_t - k \sum_k^n = 1 Dummy_t - k \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

Var PDB : Produk Domestik Bruto
PBY : Pembiayaan berdasar golongan pembiayaan
DPK : Dana Pihak Ketiga
NPF : *Non Performing Financing*
SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Model Analisis

Vector Auto Reggression (VAR)

Metode *Vector Autoregression* atau VAR adalah pendekatan non-struktural (lawan dari pendekatan struktural, seperti pada persamaan simultan) yang menggambarkan hubungan yang “saling menyebabkan” (kausalistik) antar variabel dalam sistem. Metode ini mulai dikembangkan oleh Sims pada tahun 1980 yang mengasumsikan bahwa semua variabel dalam model bersifat endogen (ditentukan di dalam model) sehingga metode ini disebut sebagai model yang a-teoritis (tidak berlandaskan teori). (Ascarya; 2009).

1. Uji Stasioneritas

Pengujian stasioneritas dapat dilakukan untuk melihat perilaku data. Uji stasioneritas dapat dilakukan dengan menggunakan metode ADF sesuai dengan bentuk tren determinasi yang dikandung oleh setiap variabel. Hasil stasioner akan berujung pada penggunaan VAR dengan model sederhana. Sedangkan variabel non stasioner meningkatkan kemungkinan keberadaan hubungan kointegrasi antar variabel.

2. Uji Optimum Lag

Penentuan optimum lag berguna untuk menghilangkan masalah dalam autokorelasi dalam sebuah sistem VAR. Untuk menetapkan besarnya lag yang optimal dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria antara lain : *Akaike Information Criteria (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SIC)*, *Hanna Quinn Information Criterion (HQ)*. Namun, dalam memberikan kestabilan dan konsisten nilai panjang lag optimum pada umumnya menggunakan SIC.

3. Uji Stabilitas Model VAR

Stabilitas model VAR dapat dilihat pada nilai modulus yang dimiliki oleh setiap variabel. Model VAR dikatakan stabil apabila nilai modulus berada pada radius < 1 , dan tidak stabil jika nilai modulus > 1 . Jika nilai Modulus yang paling besar kurang dari satu dan berada pada titik optimal, maka komposisi tadi sudah berada pada posisi optimal dan model VAR sudah stabil.

4. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang, yaitu terdapat persamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variabel-variabel di dalam penelitian ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode *Johansen's Cointegration Test*.

5. Estimasi Model VAR

Estimasi model VAR mensyaratkan data dalam kondisi stasioner. Estimasi model VAR dimulai dengan menentukan berapa panjang lag optimal (tahap VAR ke-3).

6. Uji Kausalitas

Uji kausalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Uji kausalitas dapat menggunakan berbagai metode diantaranya *Granger Causality* dan *Error Correction Model Causality*.

7. Analisis *Impuls Response Function* (IRF)

IRF dalam VAR digunakan untuk melihat dampak dari perubahan dari satu variabel terhadap perubahan variabel lainnya secara dinamis. IRF merupakan aplikasi vector moving average yang bertujuan untuk melihat jejak respon saat ini dan kedepan suatu variabel terhadap guncangan dari variabel tertentu. Bentuk dari analisis IRF pada umumnya direpresentasikan dalam bentuk grafik.

8. Analisis *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD)

Analisis FEVD digunakan untuk memprediksi kontribusi setiap variabel terhadap guncangan atau perubahan variabel tertentu. Dekomposisi varian ini menjelaskan proporsi pergerakan suatu series akibat kejutan variabel itu sendiri dibandingkan dengan kejutan variabel lain.

Stakeholder Cooperation and Participatory Approach (SCPA)

Stakeholder Cooperation and Participatory Approach (SCPA) adalah metode penerapan program dengan mengoptimalkan kerjasama antara lembaga yang kemudian dapat menciptakan konsep *Trickle Down Effect* pada masyarakat dengan berbasis pendekatan partisipatif.

Pilot Project

Pilot project adalah Pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya. (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2012).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Stasioneritas

Berdasarkan hasil uji stasioneritas dengan standar McKinnon 10% pada tingkat level, semua variabel menunjukkan ketidak stasioneritas data. Hal ini mengindikasikan bahwa uji stasioneritas harus dilanjutkan pada tingkat *1st Difference*. Hasil uji pada tingkat *1st Difference* menunjukkan bahwa semua variabel penelitian stasioner seperti yang ditunjukkan pada table di bawah ini :

Tabel 1.4
Hasil Uji Stasioneritas 1st Difference

Variabel	Trend and Intercept			Hasil Uji Data (Stasioner/Tidak Stasioner)
	1st Differences			
	Prob	ADF/t-statistik	McKinnon 10%	
D(LOGPDB)	0.0000	-6.124883	-2.625121	Stasioner
D(LOGPBY)	0.0000	-9.586983	-2.621007	Stasioner
D(LOGDPK)	0.0000	-9.248709	-2.621007	Stasioner
D(LOGNPF)	0.0000	-7.919795	-2.621007	Stasioner
D(LOGSBIS)	0.0000	-6.559662	-2.622989	Stasioner

Ini dilihat dari nilai t-statistik yang lebih kecil dibandingkan nilai McKinnon 10% (Syarat stasioner atau signifikan adalah Nilai t-statistik < Nilai Kritis McKinnon 10%). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini akan digunakan data yang terintegrasi pada derajat satu (first difference) sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

2. Hasil Uji Model VAR

Berdasarkan hasil uji estimasi model VAR maka ditemukan persamaan yang membentuk model VAR dalam penelitian yaitu :

$$LS D(LOGPDB) = C + D(LOGPDB(-2)) + D(LOGPBY(-2)) + D(LOGNPF(-1))$$

.....(4)

Keterangan :

LS D(LOGPDB) : *Least Square PDB*
C : Konstanta
D(LOGPDB(-2)) : Produk Domestik Bruto
D(LOGPBY(-2)) : Pembiayaan
D(LOGNPF(-1)) : *Non Performing Financing*

Adapun hasil regresi model VAR adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Hasil Regresi Model VAR

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.011740	0.001911	6.143.931	0.0000
D(LOGPDB(-2))	-0.857655	0.192672	-4.451.361	0.0002
D(LOGPBY(-2))	0.035631	0.011855	3.005.596	0.0060
D(LOGNPF(-1))	-0.071144	0.017694	-4.020.843	0.0005
<i>R-Squared</i>	0.490366			

Sumber : Lampiran 10

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam jangka panjang variabel PDB, PBY, dan NPF mampu menjelaskan keragaman PDB sebanyak 49 persen (*R-squared*), kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menjadi :

$$\text{LOGPDB} = 0,011740 - 0,857655 \cdot \text{LOGPDB}(-2) + 0,0035631 \cdot \text{LOGPBY}(-2) - 0,071144 \cdot \text{LOGNPF}(-1)$$

Persamaan di atas memberikan penjelasan antara lain sebagai berikut :

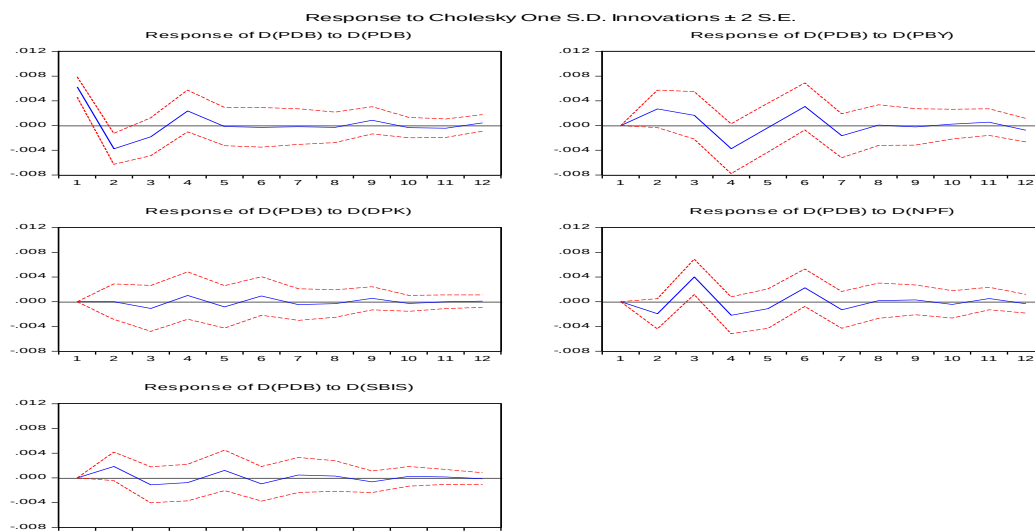
- a) Konstanta sebesar 0,011740 artinya jika variabel PDB, PBY dan NPF nilainya adalah 0, maka tingkat PDB sebesar 0,011740 persen.
- b) Koefisien regresi variabel PDB sebesar 0,857655 artinya jika variabel lain tetap dan PDB itu sendiri mengalami kenaikan 1 persen maka, PDB akan mengalami menurun sebesar 0,857655 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi hubungan negatif antara PDB dan PDB itu sendiri.
- c) Koefisien regresi variabel PBY sebesar 0,0035631 artinya jika variabel lain tetap dan PBY mengalami kenaikan 1 persen maka, PDB akan mengalami kenaikan sebesar 0,0035631 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi hubungan positif antara PBY dan PDB, semakin naik PBY semakin meningkat PDB.
- d) Koefisien regresi variabel NPF sebesar - 0.071144 artinya jika variabel lain tetap dan NPF mengalami kenaikan 1 persen maka, PDB akan mengalami penurunan sebesar 0.071144 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi hubungan negatif antara NPF dan PDB, semakin naik NPF semakin menurun tingkat PDB.

3. Hasil Uji *Impuls Response Function (IRF)*

Hasil IRF yang akan disajikan tidaklah keseluruhan melainkan hanya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Terdapat beberapa hubungan yang akan dijelaskan dalam IRF ini antara lain :

- a) Hubungan 1 : antara PDB dan PDB itu sendiri
- b) Hubungan 2 : antara PDB dan Pembiayaan (PBY)
- c) Hubungan 3 : antara PDB dan DPK
- d) Hubungan 4 : antara PDB dan NPF
- e) Hubungan 5 : antara PDB dan SBIS

Grafik 1.1 Hasil Uji Analisis IRF

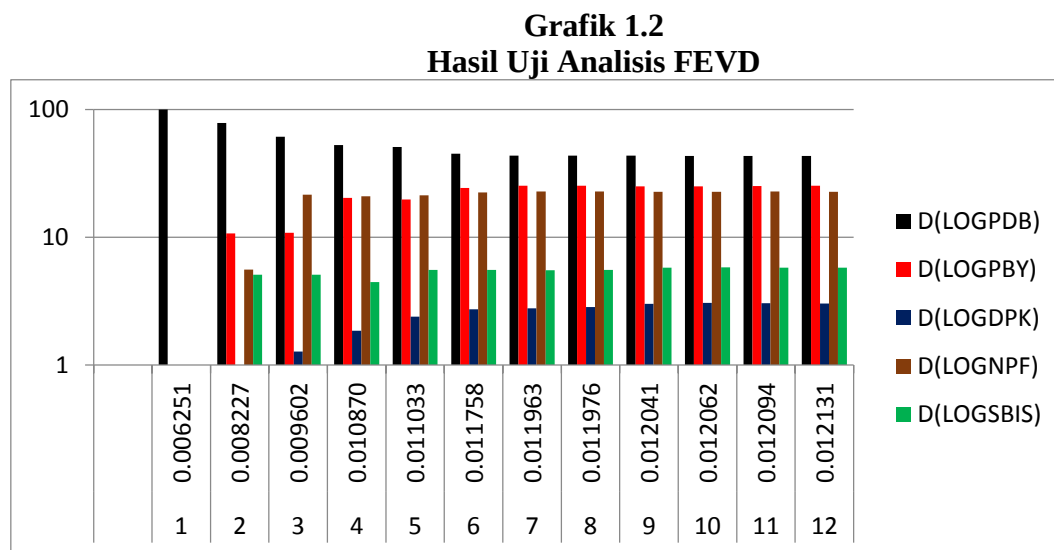


Berdasarkan grafik di atas, pengaruh PDB terhadap PDB itu tersendiri menunjukkan *shock* satu standar deviasi pada nilai PDB direspon positif pada awal periode sebesar 0.006251 persen terhadap PDB itu sendiri. Secara umum, respon PDB terhadap perubahan PDB itu sendiri adalah negatif sebagaimana terlihat dari repon kumulatif pada gambar. Pengaruh PDB terhadap Pembiayaan menunjukkan respon variabel PDB terhadap PBY pada periode awal belum direspon, hal ini berarti *shock* pada pembiayaan tidak serta menyebabkan penurunan tingkat pendapatan nasional/PDB. Secara umum, respon PDB terhadap perubahan pembiayaan adalah positif sebagaimana terlihat dari repon kumulatif pada gambar.

Sementara itu, Grafik menunjukkan respon variabel PDB terhadap DPK pada periode awal belum direspon, hal ini berarti *shock* pada DPK tidak serta menyebabkan penurunan tingkat pendapatan nasional/PDB. Secara umum, respon PDB terhadap perubahan DPK adalah positif sebagaimana terlihat dari repon kumulatif pada gambar. Grafik menunjukkan respon variabel PDB terhadap NPF pada periode awal belum direspon, hal ini berarti *shock* pada NPF tidak serta menyebabkan penurunan tingkat pendapatan nasional/PDB.

Secara umum, respon PDB terhadap perubahan NPF adalah negatif sebagaimana terlihat dari respon kumulatif pada gambar. Terakhir, grafik menunjukkan respon variabel PDB terhadap SBIS pada periode awal belum direspon, hal ini berarti *shock* pada SBIS tidak serta menyebabkan penurunan tingkat pendapatan nasional/PDB. Secara umum, respon PDB terhadap perubahan SBIS adalah positif sebagaimana terlihat dari respon kumulatif pada gambar.

4. Hasil Uji *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)*



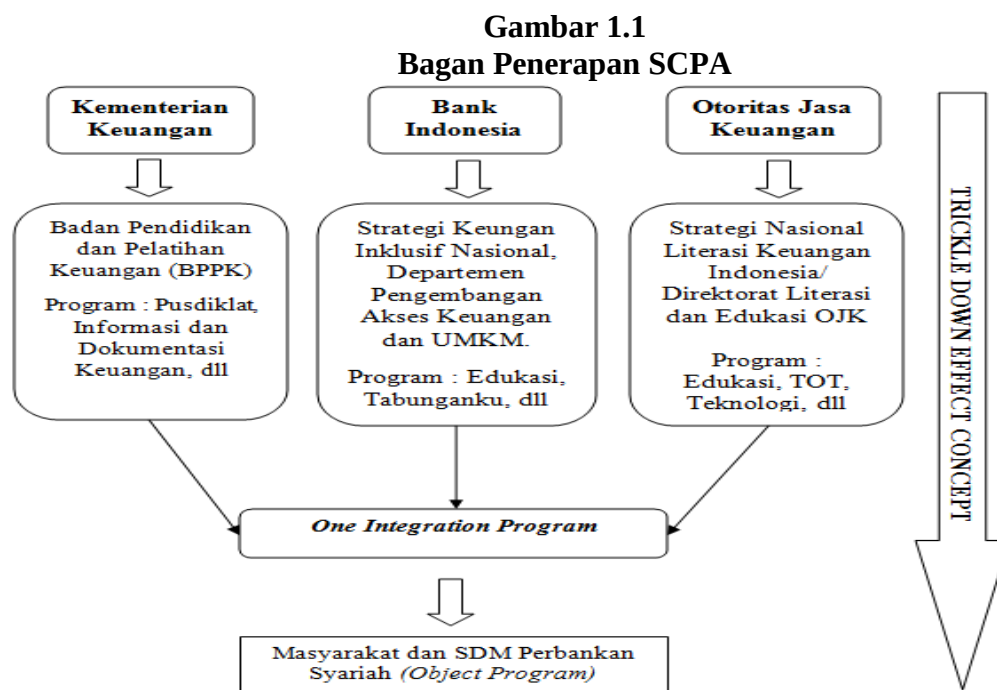
Berdasarkan grafik di atas, perubahan PDB secara umum dinominasi oleh guncangan PDB itu sendiri dengan komposisi varian sebesar 100 persen pada periode pertama dan terus mengalami penurunan pada periode berikutnya hingga menyentuh varian sebesar 43,17 persen pada periode terakhir atau periode keduabelas. Variabel selanjutnya yang memberikan dampak pada perubahan PDB adalah pembiayaan (PBY) dengan kontribusi sebesar 10,72 persen pada periode kedua dan meningkat menjadi 20,28 persen pada periode keempat.

Periode kelima sempat terjadi penurunan sebesar 19,77 persen dan terus menunjukkan fluktuasi nilai dan menyentuh angka 25,34 persen pada periode terakhir. DPK tidak menunjukkan respon yang baik pada periode kedua dan tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap PDB dengan hanya menyentuh angka 3,02 persen diakhir periode. NPF menunjukkan kinerja cukup signifikan mempengaruhi PDB dengan komposisi varian pada periode kedua mencapai 5,57 persen dan menyentuh angka 22,69 persen pada periode terakhir. Variabel SBSI menunjukkan pengaruh yang tidak cukup besar terhadap PDB dengan kecenderungan peningkatan hanya 1 persen dari semua periode. Pada periode keempat, komposisi varian menyentuh angka 4,44 persen dan angka 5,76 persen pada periode terakhir.

5. *Stakeholder Cooperation and Participatory Approach (SCPA)*

Penerapan analisis *SCPA* pada lembaga ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi program masing-masing lembaga yang berbasis pada keuangan inklusif. Berdasarkan metode penelitian yang dijelaskan sebelumnya, bahwa analisis ini akan didukung dengan

konsep *Trickle Down Effect* yang menggunakan pendekatan kelembagaan. Sehingga, konsep *Trickle Down Effect* pada penelitian ini bukan dipandang sebagai basis modal yang difokuskan pada masyarakat golongan kaya, namun lebih ke arah aspek optimalisasi kebijakan pada sebuah lembaga. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut :



Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki lembaga bernama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berfokus pada program Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Informasi/dokumentasi keuangan. Bank Indonesia (BI) memiliki kebijakan bernama keuangan inklusif di bawah arahan Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM dengan fokus program pada edukasi keuangan, TabunganKu, dan peningkatan kredit/pembiayaan pada perbankan khususnya bagi para pelaku usaha UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kebijakan literasi keuangan di bawah arahan Direktorat Literasi dan Edukasi OJK, beberapa program yang diterapkan adalah edukasi keuangan, Pengenalan akses keuangan berbasis IT, dan *Training on Trainer (TOT)* keuangan.

Implementasi konsep *Trickle Down Effect* pada kelembagaan tersebut dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Kerjasama antar lembaga dengan program berbeda, diintegrasikan pada satu program unggulan (*One Integration Program*). Program unggulan ini diharapkan dapat memberikan “Efek Menetes Ke bawah” pada masyarakat yaitu penerapan keuangan inklusif yang bersifat partisipatif (*Participatory Approach*) dan tepat sasaran.

6. Pilot Project

Secara perbankan wadah ini memiliki tujuan minimalis risiko NPF dan pemanfaatan instrumen keuangan seperti SBIS/SWBI yang tidak sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Permasalahan ini muncul karena faktor internal pada perbankan syariah. maka wadah ini fokus pada peningkatan kualitas SDM perbankan syariah. Ouput dari tujuan ini adalah penerapan 5 nilai *Maqashid Syariah* menggunakan pendekatan kelembagaan pada perbankan syariah. 5 nilai *Maqashid Syariah* tersebut antara lain :

Tabel 1.6 Penerapan Prinsip Nilai *Maqashid Syariah* di Perbankan Islam

No	Aspek	Implementasi Kelembagaan Perbankan Syariah
1	Harta	Salah satu tujuan perbankan syariah ialah mencapai laba yang sebesar-besarnya dengan tetap menjaga kepentingan pemilik modal dan juga sebagai bentuk usaha bank. Sehingga keuntungan bank (harta) bersumber dari produk bank yang jelas dan sesuai dengan sistem.
2	Jiwa	Kualitas internal perbankan (SDM) memiliki kapabilitas, pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis nasabah. Hal ini berhubungan dengan manajemen risiko perbankan syariah dalam usaha meminimalisir bentuk penyalahgunaan yang bisa menimbulkan permasalahan seperti NPF dan spekulasi SBIS/SWIB.
3	Keturunan	Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah memiliki kualitas dalam menunjang profitabilitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga potensi terjadinya NPF pada produk-produk perbankan syariah dapat diminimalisir.
4	Akal	Segala bentuk kegiatan perbankan syariah harus sesuai dengan visi dan misi perbankan syariah yang telah menjadi kesepakatan bersama. Aspek SDM, produk perbankan, serta manajemen bank memiliki orientasi dalam mewujudkan tujuan yang sama.
5	Agama	Perbankan syariah menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam segala bentuk implementasi dan aplikasinya (SDM dan produk perbankan). Praktek perbankan tidak mengindikasikan penerpan riba.

Secara masyarakat, wadah REAKSI memberikan implementasi dengan berbasis pada edukasi dan informasi. Salah satu tujuan penerapan adalah peningkatan akses pembiayaan dan aktivitas masyarakat pada perbankan syariah khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

REAKSI memiliki 5 bagian yang berorientasi pada masyarakat antara lain 1) Kamar Literasi Keuangan Syariah, 2) Kamar Perbankan Syariah, 3) Kamar Edukasi Keuangan Syariah, 4) Pojok UMKM, dan 5) Gudang Aspirasi Keuangan Syariah. Kelima bagian tersebut dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Wadah REAKSI

No	Bagian	Peran	Lembaga
1	Kamar Literasi Keuangan Syariah	Memberikan informasi, edukasi pada masyarakat umum tentang keuangan syariah (Kunjungan lapangan/Pelayanan di tempat)	Kementerian Keuangan
2	Kamar Perbankan Syariah	Memberikan informasi, dan edukasi pada masyarakat tentang jenis-jenis produk perbankan syariah yang bisa digunakan oleh masyarakat (Kunjungan lapangan/ pelayanan di tempat)	Bank Indonesia dan OJK
3	Kamar Edukasi Keuangan Syariah	Memberikan edukasi tentang keuangan syariah bagi anak usia dini, pelajar, dan mahasiswa. Khusus untuk usia dini, konsep edukasi diberikan dengan metode bermain dan belajar. (Kunjungan lapangan/ pelayanan di tempat)	Bank Indonesia dan OJK
4	Pojok UMKM	Memberikan informasi, edukasi, serta sosialisasi kepada UMKM tentang produk perbiayaan yang ada pada perbankan syariah. Kegiatan ini juga didukung dengan konsultasi pemanfaatan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang diberikan jelas dan tepat sasaran. (Kunjungan lapangan/ Pelayanan di tempat)	Bank Indonesia
5	Gudang Aspirasi Keuangan Syariah	Menerima laporan, keluhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam praktek keuangan dan perbankan syariah, kemudian diberikan alternatif penyelesaian. (Jemput aspirasi/ pelayanan di tempat)	Bank Indonesia dan OJK

Pada penerapan REAKSI di Indonesia menggunakan pola “One Region, One REAKSI” yaitu setiap kabupaten akan memiliki satu wadah REAKSI sebagai optimalisasi peran keuangan inklusif. Penerapan di setiap kabupaten akan mempermudah dalam koordinasi antara pusat dan daerah, serta koordinasi antara kota dan pedesaan. Sosialisasi wadah pada masyarakat lebih dioptimalkan dengan membangun sebuah slogan nasional “Keuangan Inklusif, Mari ber-REAKSI Bersama”.

Munculnya wadah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat melalui pembiayaan dan DPK pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia,

khususnya pada pembiayaan berdasar golongan pembiayaan (UKM dan selain UKM), sehingga mendorong pertumbuhan pendapatan nasional/PDB. Di sisi lain, wadah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko spekulasi SBIS/SWBI oleh internal perbankan syariah. Meminimalisir risiko NPF pada pembiayaan atau tetap menjaga kestabilan nilai NPF dalam batas kewajaran, melalui peningkatan nilai Maqhasid Syariah pada internal perbankan syariah serta kualitas nasabah sebagai faktor eksternal perbankan syariah. Hadirnya perbankan syariah, lembaga Stakeholder pendukung (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah), dan lembaga sejenis REAKSI merupakan bentuk perwujudan tujuan perbankan syariah berdasarkan Handbook of Islamic Banking yaitu tidak berorientasi pada keuntungan bank namun memberikan keuntungan sosio-ekonomi kepada masyarakat.

7. Analisis Teoritis

Berdasarkan analisis tinjauan pustaka yang dikorelasikan dengan hasil penelitian maka terdapat beberapa hasil penyesuaian dikhususkan pada teori pertumbuhan ekonomi antara lain :

- a) Hasil penelitian yang menunjukkan tingkat pembiayaan berdasar golongan pembiayaan (UKM dan selain UKM) berpengaruh positif terhadap PDB memiliki korelasi dengan teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peningkatan pembiayaan oleh UKM dan selain UKM mengindikasikan peningkatan jumlah wirausaha atau entrepreneur yang dapat menggerakkan perekonomian (PDB) dengan inovasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Mengalirnya modal pembiayaan dari Bank Umum Syariah dan Uni Usaha Syariah kepada para pelaku UKM dan selain UKM mendukung argumentasi Scumpeter bahwa “Terdapat dua faktor yang menunjang terlaksananya inovasi oleh para pengusaha yaitu : cadangan ide-ide baru dan adanya sistem pengkreditan yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur untuk merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”. Secara tidak langsung, perbankan syariah dengan pembiayaan yang dilakukan kepada pelaku usaha mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau PDB. Hasil komparasi penelitian dan teori Scumpeter mendukung regulasi pemerintah yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2000 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b) Teori pertumbuhan Harrod-Domar memiliki korelasi dengan hasil penelitian yaitu dari sisi tabungan (DPK). Teori mengasumsikan bahwa besarnya tabungan masyarakat adalah

proporsional dengan besarnya pendapatan nasional/PDB, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Sehingga meningkatnya tabungan akan meningkatkan pendapatan nasional/PDB. Tabungan merupakan salah satu instrumen dari DPK, dan pada penelitian telah dihasilkan bahwa peningkatan DPK akan meningkatkan PDB. Teori ini umumnya membahas tentang investasi, dan melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang akan meningkatkan output. Untuk mampu melakukan investasi, perekonomian harus menyisihkan outputnya sebagai tabungan. Sehingga tabungan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena tabungan sebagai sumber investasi.

- c) Analisis teori berdasarkan mazhab kedua (Mainstream) mengindikasikan bahwa kebijakan/produk moneter pada perbankan syariah bertujuan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang produktif. Salah satu kegiatan ekonomi produktif dan berdampak pada pendapatan nasional/PDB adalah pembiayaan oleh perbankan syariah kepada para pelaku usaha sektor riil seperti UMKM. Hal ini akan meningkatkan investasi yang berdampak pada peningkatan permintaan agregat, sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Analisis teori ini berkorelasi dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa peningkatan akses pembiayaan pada UMKM akan berdampak pada meningkatnya pendapatan nasional/PDB.
- d) Analisis teori berdasarkan mazhab ketiga (alternatif) mengindikasikan perlunya keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil. Kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas perbankan (termasuk perbankan syariah) terkhusus pada produk perbankan itu sendiri. Kebijakan sektor riil diartikan sebagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk akses di bidang perbankan khususnya berkaitan dengan pembiayaan di sektor produktif. Keseimbangan antara dua kebijakan tersebut akan menghasilkan peningkatan pada pendapatan nasional pada analisis jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan akan meningkatkan pendapatan nasional/PDB, sehingga dapat diasumsikan bahwa peningkatan pembiayaan berdasar golongan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terjadi karena keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Dalam membentuk model VAR, langkah awal dilakukan uji stasioneritas, lalu harus ditentukan berapa banyak lag yang paling sesuai dengan model. Untuk menentukan banyak lag yang paling sesuai dengan model, maka kriteria yang di gunakan adalah didasarkan pada nilai uji *Akaike Information Criteria (AIC)* yang menghasilkan nilai minimum. Setelah mendapatkan nilai AIC yang paling minimum dilakukan uji kausalitas untuk mengetahui pengaruh variabel pilihan (Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya model VAR dapat diestimasi dengan metode kuadrat terkecil jika terdapat pengaruh variabel pilihan (Pembiayaan, DPK, NPF, dan SBIS) terhadap PDB, kemudian dianalisis melalui metode *Analysis Impuls Response Function (IRF)* dan *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)*.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel pilihan (Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)) pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap perekonomian Indonesia (PDB) pada tahun 2007-2014 dengan menggunakan langkah-langkah di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Variabel Pembiayaan, DPK, NPF, dan SBIS merupakan *leading indicator* bagi PDB. Hal ini dibuktikan dari hasil uji kausalitas (panjang lag 2), model regresi VAR dan analisis IRF didapatkan:

1. DPK menjadi *leading indicator* (indikator yang dapat mempengaruhi pergerakan) bagi PDB.
2. DPK juga menjadi *leading indicator* (indikator yang dapat mempengaruhi pergerakan) bagi Pembiayaan, NPF, SBIS.
3. Model regresi VAR menunjukkan variabel PDB itu sendiri, Pembiayaan dan NPF signifikan terhadap terhadap PDB.
4. Analisis IRF menunjukkan variabel Pembiayaan, DPK, SBIS berpengaruh positif terhadap PDB, sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan hasil penelitian ataupun penelitian lanjutan adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan PDB sebagai *single objective* dapat dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan dan DPK sehingga meningkatkan pertumbuhan PDB. Pemerintah perlu menjaga tingkat kestabilan atau meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui instrumen pembiayaan ataupun DPK.
2. Pengaruh tingkat NPF pada pembiayaan yang berdampak negatif terhadap PDB diharapkan dapat direspon pemerintah dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah baik secara internal (pegawai bank) ataupun eksternal (nasabah). Salah satunya dengan menerapkan prinsip 5 *maqashid syariah* berbasis kelembagaan perbankan islam.
3. Pemerintah perlu mengoptimalisasi program keuangan inklusif untuk meningkatkan pengetahuan, partisipasi, kualitas masyarakat terhadap sektor perbankan khususnya perbankan syariah. Salah satu usahanya adalah membuat *one integration program* pada program keuangan inklusif yang diimplementasikan secara riil di masyarakat melalui Rumah Edukasi dan Aspirasi Keuangan Syariah (REAKSI)
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu dapat menambahkan variabel-variabel terkait seperti *Return on Asset (ROA)*, Jumlah uang beredar, dan Tenaga kerja pada perbankan syariah.

Keterbatasan Penelitian

Semaksimal mungkin peneliti sudah mengusahakan sebuah penelitian yang sempurna, namun ternyata masih banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Model VAR dianggap a-teoritis, karena menggunakan lebih sedikit informasi dari teori-teori terdahulu, tidak seperti model persamaan simultan, dimana pemasukan dan pengeluaran variabel tertentu memainkan peran penting dalam identifikasi model.
2. Model VAR kurang sesuai untuk analisis kebijakan, disebabkan terlalu menekankan pada prediksi (*forecast*).
3. Pemilihan panjang lag menjadi tantangan terbesar, khususnya ketika variabel terlalu banyak dengan lag panjang, sehingga ada terlalu panjang parameter yang akan mengurangi *degree of freedom* dan memerlukan ukuran sampel yang besar.
4. Semua variabel harus stasioner. Jika tidak, data harus ditransformasi dengan benar (misalnya, diambil first difference-nya). Hubungan jangka panjang yang diperlukan dalam analisis akan hilang dalam transformasi.

5. *Impulse Response Function*, yang merupakan inti dari analisis menggunakan metode VAR, masih diperdebatkan oleh para peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. And Omar, M.A. 2012, *Islamic Banking and Economic Growth: the Indonesian Experience*, Vol.5 No.1, halaman 35-47.
- Adhi Nugroho, Fajar. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2009-2012)*. Skripsi Strata Satu. Yogyakarta: Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab*. Yogyakarta: Buku Republika.
- Antonio, M.Syafi'i. 2011. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Ascarya, 2012, *Penguatan Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian*. Jurnal Ekonomi Islam Republika, Januari 2012, Halaman 25.
- Bank Indonesia, 2008, *Statistik Perbankan Syariah 2007*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, 2009, *Statistik Perbankan Syariah 2008*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, 2010, *Statistik Perbankan Syariah 2009*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, 2011, *Statistik Perbankan Syariah 2010*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, 2012, *Statistik Perbankan Syariah 2011*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, 2013, *Statistik Perbankan Syariah 2012*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, 2014, *Statistik Perbankan Syariah 2013*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2013. *Keuangan Inklusif (Bahan Edukasi)*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.(PDF)
- Bank Indonesia. Maret 2012. *Kajian Stabilitas Keuangan No.18*. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Basuki, A.T, dan Yuliadi, Imam.2014. *Ekonometrika; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Echchabi, A, and Azouzi, D. 2015. *Islamic Finance Development and Economic Growth Nexus: The Case of the United Arab Emirates (UAE)*. Vol 7 No 3, halaman 106-111.
- Farahani, Y.G, and Dastan, M. 2013. *Analysis of Islamic banks' financing and economic growth: a panel cointegration approach*. Vol 6 No 2, halaman 156-172.
- Firmansyah, Irman. Oktober 2014. *Determine of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank In Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2.
- Huda, Nurul. Dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

- Inayah, Tanzilatul. 2014. *Analisis Pengaruh Simpanan, NPF (Non Performing Financing), dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Periode Januari 2009-Oktober 2013)*. Skripsi Strata Satu. Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2010. *Data UMKM 2009-2010*.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2011. *Data UMKM 2010-2011*.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2012. *Data UMKM 2011-2012*.
- Muhamad. 2000. *Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI).
- Nury Pertiwi, Yurtika. 2013. *Analisis Pencegahan dan Penanganan Non Performing Financing (NPF) dalam Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indoensia dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga)*. Skripsi Strata Satu. Yogyakarta: Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, Januari 2015, *Statistik Perbankan Syariah 2014*, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi (PDF)
- Sumitro, Warkam. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Todaro, Michael P. 1998, *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga edisi keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yuliadi, Imamudin. 2007. *Ekonomi Islam; Filosofi, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: LPPI UMY.